

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

NOTA DINAS

NOMOR: 245 /Dt.8.1.ND/11/2017

Yth : Kepala Biro Hukum  
Dari : Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan  
Hal : Konfirmasi atas Progres Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas  
Tahun 2017  
Tanggal : 6 November 2017

---

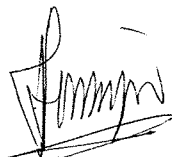
Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 841/B.03.ND/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi atas Progres Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 71/M.PPN/HK/05/2017 tentang Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan merupakan pemrakarsa penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Penyusunan Peraturan Menteri dimaksud saat ini telah sampai pada tahap draft awal rancangan dan telah mengadakan pertemuan untuk meminta masukan dari *stakeholders* internal Bappenas. Selanjutnya dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan-pertemuan dengan *stakeholders* eksternal Bappenas untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terhadap penyusunan peraturan menteri dimaksud.
3. Kendala penyusunan peraturan menteri dimaksud adalah sebagai berikut:
  - SBSN merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan Proyek/Kegiatan KL yang proses perencanaan dan penganggarannya perlu diselaraskan dengan proses dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang saat ini peraturan pelaksanaannya juga masih dalam proses penyusunan;
  - Proyek/Kegiatan KL yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai proses seleksi, prioritas, dan monev proyek SBSN memerlukan diskusi yang lebih mendalam dengan berbagai *stakeholders* yang terlibat.

4. Penyusunan draft peraturan menteri dimaksud dilaksanakan dengan kerangka waktu (tentatif) sebagai berikut:

Agenda	Jadwal
Pembahasan dengan <i>stakeholders</i> internal Bappenas:	Minggu II Oktober 2017
Pembahasan <i>Outline</i> dengan <i>stakeholders</i> terkait:	Minggu II-IV November 2017
Penyusunan sustansi ( <i>draft</i> ) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas	Minggu I Desember 2017– Minggu IV Januari 2018
Pembahasan <i>draft</i>	Minggu I – IV Februari 2018
Finalisasi <i>draft</i>	Minggu I-II Maret 2018
Penyampaian <i>draft</i> peraturan menteri kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	Minggu III Maret 2018
Penetapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Minggu IV Maret 2018

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih.



Teni Widuriyanti

# LEMBAR EDARAN

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1466/Dt.8.1/10/2017	27 Oktober 2017	Rahasia / <u>Segera</u> / Biasa
Diterima dari : Kepala Biro Hukum No. / Tgl Surat : 841/B.03.ND/10/2017 27 Oktober 2017 Perihal : Permohonan Konfirmasi atas Progres Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017		
<b>Diteruskan Kepada :</b>		<b>Disposisi :</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendarto <input type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno  <b>Staf Pendukung</b> <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File

**Catatan :**

*Sugeng, siapkan draft laporan ND yg update  
progres permenn. kord & subdit lainnya dan  
tim ADB.*

*Teni* 11/10/2017

Teni Widuriyanti

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

NOTA DINAS  
NOMOR 841 /B.03.ND/10/2017

Kepada Yth. : Daftar Terlampir  
Dari : Kepala Biro Hukum  
Hal : Permohonan Konfirmasi atas Progres Rancangan Peraturan Menteri  
PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017  
Tanggal : 27 Oktober 2017

---

Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.71/M.PPN/HK/05/2017 tentang Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 ditetapkan 30 (tiga puluh) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk diselesaikan pada Tahun 2017, namun demikian per Oktober 2017, baru ditetapkan **6 (enam) Peraturan Menteri** (matrik terlampir). Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dukungan Saudara guna percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud. Konfirmasi tersebut dapat berupa *updated* proses penyusunan ataupun penyampaian kendala yang dialami dalam proses penyusunan. Kemudian, mohon tanggapan dan konfirmasi tersebut dapat disampaikan kepada Biro Hukum paling lambat hari Rabu, tanggal 1 November 2017.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

  
RR. Rita Erawati

Tembusan Yth:  
Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

Lampiran Nota Dinas :

Nomor : 841 /B.03.ND/10/2017

Tanggal : 27 Oktober 2017

Kepada Yth:

1. Direktur Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan;
2. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Transportasi;
5. Direktur Perencanaan, Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
7. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun;
8. Direktur Kehutanan;
9. Direktur Pengembangan Wilayah;
10. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Biro Umum;
14. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
15. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2017  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2017

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	Pedoman Umum Pengentasan Permukiman Kumuh Nasional	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
2	Pembangunan Kota Baru	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
3	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (JEJAKMU)	Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
4	Pedoman Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
5	Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019	Direktorat Transportasi
6	Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Direktorat Perencanaan, Pengembangan Pendanaan Pembangunan
7	RAN Pangan dan Gizi Tahun 2015 - 2019	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
8	Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah	Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
9	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG's)	Direktorat Kehutanan
10	Pedoman Penyusunan RKP	1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; 2. Direktorat Pengembangan Wilayah.

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
11	Pedoman Pengusutan, Penilaian, dan Penetapan Proyek Prioritas	1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan. 2. Biro Hukum
12	Pedoman Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di Depan Sidang Bersama DPR dan DPD	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
13	Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
14	Pedoman Penyusunan Peta Jabatan, Beban Kerja, dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai Unit Kerja	Biro Sumber Daya Manusia
15	Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia
16	Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia
17	Pedoman Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian PPN/Bappenas (HC DP)	Biro Sumber Daya Manusia
18	Pedoman LHKPN bagi Pejabat	Biro Sumber Daya Manusia
19	Pedoman Kebijakan Pola Karir Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
20	Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum
21	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpasing JFP	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
22	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi di Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
23	Pedoman Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/05/2017  
TENTANG  
DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...



6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017.

PERTAMA : Membentuk Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan dibahas oleh Biro Hukum dengan unit kerja terkait untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

KETIGA : Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diusulkan di luar Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dibahas oleh Biro Hukum dan unit kerja pengusul untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 71/M.PPN/HK/05/2017

TANGGAL 24 MEI 2017

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2017

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	Pedoman Umum Pengentasan Permukiman Kumuh Nasional	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
2	Pembangunan Kota Baru	Direktorat Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan
3	Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (JEJAKMU)	Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
4	Pedoman Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
5	Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019	Direktorat Transportasi
6	Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Direktorat Perencanaan, Pengembangan Pendanaan Pembangunan
7	RAN Pangan dan Gizi Tahun 2015 - 2019	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
8	Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
9	Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah	Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun
10	Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG's)	Direktorat Kehutanan
11	Pedoman Penyusunan, Pencelaahan dan Revisi Renja KL	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
12	Pedoman Penyusunan RKP	1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; 2. Direktorat Pengembangan Wilayah.

13	Pedoman Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Proyek Prioritas	1. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan. 2. Biro Hukum
14	Tata Cara Pentajukan dan Pengangkatan PLT	Biro Hukum
15	Perubahan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Hukum
16	Pedoman Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di Depan Sidang Bersama DPR dan DPD	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
17	Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
18	Pedoman Penyusunan Peta Jabatan, Beban Kerja, dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai Unit Kerja	Biro Sumber Daya Manusia
19	Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Biro Sumber Daya Manusia
20	Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia
21	Pedoman Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian PPN/Bappenas (HCDP)	Biro Sumber Daya Manusia
22	Pedoman LHKPN bagi Pejabat	Biro Sumber Daya Manusia
23	Pedoman Kebijakan Pola Karir Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
24	Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja JFP di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia
25	Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum
26	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas	Biro Umum
27	Penanganan dan Pencegahan Konflik Kepentingan	Inspektur Bidang Administrasi Umum
28	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Impasing JFP	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
29	Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi di Kementerian PPN/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
30	Pedoman Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

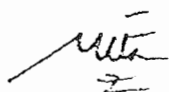
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati